

PERAN KEPALA ADAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA TANG PAYEH KECAMATAN KRAYAN KABUPATEN NUNUKAN

Ardian Supriadi¹

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Peran Kepala Adat dalam Pembangunan Desa, kemampuan Kepala Adat mengkomunikasikan dan memediasi dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Tang Payeh berjalan baik, serta menyelenggarakan pemerintahan desa yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, serta peningkatan pembangunan yang selalu beorientasi kepada kepentingan umum dan bekerja sama dengan pihak Pemerintah untuk memperlancar dan mempercepat pembangunan desa.

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Adat Desa Tang Payeh. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi obyek yang alami, data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan analisis data dilakukan secara induktif. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Untuk menentukan informan dilakukan dengan metode snowball sampling.

Temuan dari penelitian ini bahwa Peran Kepala Adat Dalam Pembangunan di Desa Tang Paye Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan adalah Peran Kepala Adat sebagai Komunikator dan Mediator dalam pembangunan. Kepala Adat telah melaksanakan tugas dan fungsinya hanya saja dalam melaksanakan perannya terdapat beberapa kendala sehingga perlu dicarikan jalan kluarnya agar pembangunan yang ada di Desa Tang Payeh sesuai dengan aspirasi masyarakat, serta peningkatan pembangunan yang selalu beorientasi kepada kepentingan umum.

Kata Kunci: *Peran Kepala Adat Sebagai Komunikator dan Mediator dalam Pembangunan*

PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas Desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintah dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Email: ardian23glate@gmail.com

Dalam penjelasan tersebut, antara lain dikemukakan bahwa “oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat* (Negara Kesatuan), maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia terbagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu, di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas permusyawaratan.

Sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945 hingga sampai pada saat ini, peraturan-peraturan perundang yang mengatur tentang bentuk dan susunan pemerintahan di daerah, termasuk pemerintah desa, yaitu sebagai berikut : UU No.1 tahun 1945 tentang pembentukan Komite Nasional Daerah, Penetapan Presiden No.6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah (disempurnakan), penetapan Presiden No.5 Tahun 1960 (disempurnakan) tentang DPRD Gotong Royong dan Sekretariat Daerah, UU No.19 Tahun 1965 tentang Desapraja, UU No.5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah, UU No.5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Pembangunan dalam masyarakat mencakup pengertian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Yang pada dasarnya berhasil jika masyarakat ikut terlibat di dalamnya. Di tengah masyarakat yang beraneka ragam suku dan budaya, tentunya mempunyai nilai seperti : nilai kekeluargaan, kegotongroyongan, kejuangan dan yang khas pada masyarakat kita, sehingga dengan adanya nilai-nilai tersebut masyarakat mengembangkan diri dan mencapai kemajuan.

Pembangunan dalam masyarakat haruslah diterapkan sistem dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sehingga masyarakat menyadari betapa pentingnya suatu pembangunan yang ada di daerahnya. Birokrasi dalam hal ini pemerintah harus dapat berjalan efektif, artinya mampu menjabarkan dan melaksanakan pembangunan pada daerah masing-masing dan di sini masyarakat adalah pelaku utama pembangunan sedangkan pemerintah (birokrasi) berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan iklim yang menunjang setiap pembangunan.

Dalam meningkatkan pembangunan maka pemerintah haruslah mengkomunikasikan kepada masyarakat manfaat atau kegunaan setiap pembangunan yang masuk di daerahnya.

Pemerintah dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan haruslah mempunyai kredibilitas, daya tarik, kesamaan dalam hal kebutuhan, harapan dan perasaan agar masyarakat dapat dipengaruhi untuk mengikuti keinginan dari pemerintah sehingga pembangunan dapat dilaksanakan.

Komunikasi mempunyai sejumlah pengaruh baik terhadap tipe, sasaran, tugas pemerintahan termasuk di dalamnya pemeliharaan hubungan. Tanpa adanya

sarana dan fasilitas untuk hubungan komunikasi ke segala arah dalam suatu kegiatan, akan sulit diketahui apa yang sudah dicapai, apa yang akan diraih dan bagaimana kendala dalam pelaksanaan pekerjaan dan komunikasi adalah sumber informasi bagi pimpinan dalam menginformasikan berbagai kebijakan ataupun tentang pembangunan.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan desa. Lembaga kemasyarakatan desa merupakan mitra pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintah di Indonesia jauh sebelum Negara-Bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa merupakan wujud bangsa yang paling konkret.

Sejalan dengan pembangunan nasional di kenal adanya pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa dalam rangkaian pembangunan nasional. Pembangunan desa lebih menitik beratkan pada perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Untuk lebih menyukkseskan pembangunan tersebut sangat dibutuhkan adanya kerja sama yang baik antar masyarakat dengan pemerintah utamanya dengan pemuka-pemuka masyarakat setempat.

Dalam negara kesatuan RI yang berbineka Tunggal Ika ini, khususnya kalimantan Timur terdiri dari berbagai suku bangsa yang berarti pula memiliki beraneka ragam adat istiadat, bahasa, kehidupan dan penghidupan serta lingkungan hidupnya. Untuk mengembangkan dan membangun masyarakat yang demikian ini kita harus melihat dan bertitik tolak pada keanekaragaman tadi demi keutuhan dan kesatuan bangsa pada umumnya, dan kesuksesan pembangunan pada khususnya. Pembangunan merupakan tugas utama pemerintah dan masyarakat dalam dalam rangka pengembangan dan membina kehidupan bangsa.

Dalam masyarakat adat/primodial atau tradisional, untuk menggerakkan masyarakat desa (rural) berbeda dengan masyarakat perkotaan (urban). Masyarakat dapat digerakkan dengan memperhatikan adat setempat. Adat setempat adalah adat yang hidup dan berkembang, diikuti dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Dalam keanekaragaman suku bangsa ini sering kita jumpai kebiasaan-kebiasaan maupun tradisi yang berlaku dalam suatu masyarakat

tertentu. Misalnya kebiasaan-kebiasaan yang bersifat turun-temurun dari nenek moyang, seperti kebiasaan bahwa pemimpin dalam suatu kelompok masyarakat diturunkan oleh leluhurnya dan ini akan berjalan terus, masyarakat yang demikian ini merupakan masyarakat yang masih tradisional. Seperti kita ketahui bahwa dalam masyarakat ini anggotanya lebih cenderung mematuhi pemimpinnya sendiri dari pada penguasa-penguasa lain yang ada disekitarnya. Apalagi penguasa-penguasa lain tadi yang dianggap tidak sejalan dengan kebiasaan yang dihormati dalam masyarakat tersebut.

Berdasarkan pengertian ini didalam menyukseskan kegiatan pemerintahan khususnya pemerintahan desa maka sangat diperlukan adanya jalinan kerjasama yang serasi antar pemerintah desa dengan tokoh-tokoh/pemimpin masyarakat tadi. Dalam hubungan kepemimpinan tradisional ini di beberapa daerah di Kalimantan Timur khususnya di daerah pedalaman kita kenal adanya sebutan kepala adat. Sebutan kepala adat ini diberikan kepada seorang yang dipilih dari antara sekelompok masyarakat tertentu sebagai pemimpin atau pemegang kekuasaan dalam masyarakat tersebut. Kepala adat dalam hal tertentu sangat berpengaruh didalam kehidupan masyarakatnya.

Berdasarkan sebatas gambaran di atas, betapa pentingnya suatu kerjasama dan koordinasi yang tetap antara pemerintah khususnya pemerintah daerah dengan pemuka-pemuka masyarakat khususnya para kepala adat dalam usaha menyukseskan program-program pemerintah dalam rangka pengembangan masyarakat yang masih bersifat tradisional tersebut.

Tang Paye merupakan Desa yang didominasi oleh suku Dayak Lundayeh. Dengan keadaan demikian, pengaruh adat Lundayeh sangat mendominasi dalam kehidupan bermasyarakat, tidak terkecuali pada pemerintahan Desa Tang Paye. Melihat kondisi diatas sebagai penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “ Peran Kepala Adat Dalam Pembangunan Di Desa Tang Paye Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan”.

KERANGKA DASAR TEORI

Peran

Menurut Soekanto (2006:243) peranan atau (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.

Sedangkan menurut Patton (2006:171) peran ditujukan pada pola perilaku yang diharapkan menjadi sifat untuk posisi tertentu di suatu organisasi. Peran tersebut merupakan apa yang harus dilakukan oleh seseorang guna mensahkan keberadaannya pada posisi tertentu. Dari definisi dapat disimpulkan peranan adalah suatu rangkaian perilaku seseorang, yang timbul berdasarkan tindakan dan kemampuan seseorang untuk melakukan hak dan kewajiban berkaitan dengan kedudukan, tugas dan fungsinya dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh masyarakat.

Robin dan culter (2005: 66) mengungkapkan bahwa “peran merujuk ke serangkaian pola perilaku yang diharapkan yang nempel pada seseorang yang menduduki posisi tertentu pada unit sosial tertentu”.

Menurut Muklas (2005) pada umumnya peranan dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi bagian atau pemegang kedudukan yang mana dalam terjadinya suatu hal, kegiatan ataupun peristiwa dalam kehidupan kemasyarakatan berdasarkan non-na/peraturan tertentu. Hal ini dapat diketahui bahwa peranan sebagai faktor dalam perilaku yang di diharapkan bias menjadi baik dan menjadi jahat, dan peranan ini dimiliki oleh seseorang yang menduduki salah satu posisi dalam sebuah unit sosial.

Menurut Rivai (2006) peranan dapat di artikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin di dalam suatu organisasi mempunyai peranan, setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana nanggung peranan berperilaku. Sehingga peranan dari pemimpin ini yang menentukan sasib untuk bawahannya.

Kepala Adat

Abdul Haris Asy'arie (2005:84) mengemukakan bahwa kepala adat adalah seseorang pemimpin yang benar-benar memimpin masyarakat dengan berpegang pada adat dan aturan yang sebenarnya, tidak memihak saat bertindak menjadi penengah dalam suatu perkara dan tidak berat sebelah dalam membuat suatu keputusan. Kedudukan kepala adat sangat strategis, karena kepala adat menjalankan hak, wewenang dan adat istiadat yang merupakan penyelenggara tanggung jawab dalam pembangunan dan kemasyarakatan.

Winardi dalam Patton (2005) pemimpin informal adalah seorang atau sekelompok orang yang karena latar belakang pribadinya sangat kuat mewarnai dirinya (diri mereka) memiliki kualitas subjektif ataupun objektif yang memungkinkannya tampil dalam kedudukan di luar struktur organisasi resmi namun ia dapat mempengaruhi kelakuan atau tindakan suatu kelompok masyarakat baik dalam arti positif maupun negatif.

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Nunukan nomor 24 tahun 2001 tentang pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat di Wilayah Kabupaten Nunukan. Kepala adat berperan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yaitu dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat sesuai dengan aturan adat istiadat yang berlaku, dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat.

Pengertian Kepemimpinan

Menurut Fahmi (2014:68) kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang mengkaji secara komprehensif tentang bagaimana mengarahkan, mempengaruhi, dan mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang direncanakan.

Selanjutnya menurut Amirullah dan Budiyono (2004 : 245) kepemimpinan merupakan orang yang memiliki kewenangan untuk memberi tugas, mempunyai kemampuan untuk membujuk atau mempengaruhi oranglain (bawahan) melalui pola hubungan yang baik guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. maka dapat diambil kesimpulan bahwa kepemimpinan adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengkoordinasi dan memberikan arah serta dapat mempengaruhi oranglain untuk mau bekerja sama melaksanakan tugas-tugas yang saling berkaitan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Siagian (2010:48-70) terdapat lima peran pemimpin, yaitu :

1. Penentu arah, yaitu pemimpin menentukan arah tujuan organisasi dalam pengambilan keputusan dan pemimpin merupakan salah satu faktor yang mendorong untuk dapat mewujudkan visi dan misi yang dilakukan secara terencana dan bertahap.
2. Wakil dan juru bicara organisasi, yaitu pemimpin berperan sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam menjalin komunikasi dengan pihak atau instansi lain.
3. Komunikator, yaitu kemampuan seorang pemimpin untuk mengkomunikasikan berbagai sasaran, strategi, tindakan atau keputusan yang diambil baik secara lisan maupun tertulis untuk disampaikan kepada para pelaksana kegiatan operasional atau bawahan melalui jalur komunikasi yang terdapat dalam organisasi
4. Mediator, yaitu kemampuan seorang pemimpin dalam menyelesaikan situasi konflik yang mungkin timbul dalam suatu organisasi, maupun lingkungannya tanpa mengurangi pentingnya situasi konflik yang mungkin timbul dalam hubungan keluar yang dihadapi maupun yang diatasi.
5. Integrator, yaitu pemimpin yang berfungsi sebagai penyatu dari berbagai individu dan kelompok yang berbeda pola pikir menuju pada tujuan bersama.

Strategi Komunikasi

Menurut Harold D. Laswell "komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu (Effendy, 2000 : 10)". Paradigma Laswell menyatakan: who, says what, in which channel, to whom with, what effect (siapa, mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dengan efek apa) hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi meliputi 5 unsur yaitu:

1. Komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan
2. Pesan (message), yaitu pernyataan yang didukung oleh lambang, ide, opini, informasi dan lain sebagainya
3. Komunikan (communicant, audience), yaitu orang yang menerima pesan
4. Saluran (media, channel), yaitu alat yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan

Efek (effect) yaitu efek atau pengaruh kegiatan komunikasi yang dilakukan komunikator kepada komunikan (Effendy, 2000 : 6)

Ada berbagai definisi strategi komunikasi, menurut Effendy (2007:32) yang menyatakan bahwa “strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai sebuah tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut strategi tidak lah berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah aja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasional.

Komunikasi dalam pengertian paradigmatis bersifat intensional, mengandung tujuan; karena itu harus dilakukan dengan perencanaan. Se jauh mana kadar perencanaan itu, bergantung kepada pesan yang akan dikomunikasikan dan pada komunikan yang dijadikan sasaran. (Effendy, 2000: 5). Pada bagian lain juga dinyatakan bahwa komunikasi merupakan dasar dari perubahan sosial. Perubahan yang dikehendaki dalam pembangunan tentunya perubahan ke arah yang lebih baik atau lebih maju keadaan sebelumnya.

Pentingnya Strategi Komunikasi

Para ahli komunikasi, terutama di Negara-negara yang sedang berkembang, dalam tahun-tahun terakhir ini menumpahkan perhatiannya yang besar terhadap strategi komunikasi (*Communication strategi*), dalam hubungan dengannya dalam pergantian pembangunan nasional dinegara masing-masing.

Fokus perhatian ahli komunikasi ini memang penting untuk ditujukan kepada strategi komunikasi, karena berhasilnya tidak kegiatan komunikasi secara efektif banyak ditentukan oleh strategi komunikasi. Strategi komunikasi baik secara makro (*planned multi-media strategy*) mempunyai fungsi ganda :

1. Menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasife dan intruktif secara sistematik kepada sasaran untuk memperoleh hasil optimal.
2. Menjembatani “*cultural gap*” akibat kemudahan dioprasionalkannya media masa yang begitu ampuh, yang jika dibiarkan akan merusak nilai-nilai budaya.

Strategi pada akhirnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanaya menunjukkan arah saja, tetapi harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Stategi komunikasi merupakan panduan perencanaan komunikasi dengan manajemen komunikasi untuk mencapai suatu tujuan (Effendy, 2004: 32). Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana oprasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (approach) bias berbeda sewaktu-waktu tergantung dari sistuasi dan kondisi.

Sesuai dengan pendapat di atas, maka adapat ditarik suatu kesimpulan bahwa strategi komunikasi adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir oleh sebuah organisasi.

Tujuan Staregi Komunikasi

Tujuan sentral stategi komunikasi dikemukakan oleh Pace, Peterson, dan Burnett (Anggraini, 2009:11) sebagai berikut

1. *To Secure Understanding*, untuk memastikan bahwa terjadi suatu pengertian dalam berkomunikasi.
2. *To Establish Acceptance*, bagaimana cara penerima itu diterima dengan baik.
3. *To Motive Action*, penggiatan untuk memotivasinya.
4. *The Goals Which the Communication Sought To Active*, bagaimana mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh pihak komunikator dari proses komunikasi tersebut.

Pembangunan Masyarakat Desa

Pembangunan merupakan suatu yang ingin dicapai semua kalangan baik itu masyarakat maupun pemerintah, pembangunan juga merupakan sesuatu daya upaya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dari yang buruk menjadi lebihbaik. Dengan mendaya gunakan segala sumber daya yang ada pelaksanaan pemngunan tersebut dilaksanakan bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah sesuai dengan apa yang diinginkan, yang dimana pembangunan harus dapat memberikan perubahan hidup baginmasyarakat menuju kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Binoro Tjokroamidjojo dalam Lambang (2007), mengemukakan pengertian pembangunan adalah merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya.

Menurut Saul M. Katz yang dikutip oleh Teguh Yuwono (2001:4) mengatakan pembangunan sebagai perubahan sosial yang besar dari suatu keadaan tertentu ke keadan yang dipandang lebih bernilai.

Tujuan Pembangunan

Pembangunan bertujuan untuk kebaikan masyarakat yang memiliki hakikat yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Khairuddin (2002:29), menyatakan pada umumnya, Komponen dari cita-cita akhir dari Negara modern di dunia baik yang sudah maju ataupun yang sedang berkembang, adalah hal-hal yang pada hakikatnya adalah bersifat relatif dan sukar membayangkan tercapainya "titik jenuh" yang absolute yang setelah tercapai tidak mungkin ditingkatkan bagi seperti:

- a. Keadilan sosial
- b. Kemakmuran yang merata
- c. Perlakuan sama dimata hokum
- d. Kebahagiaan mental, spiritual dan material
- e. Kebahagiaan untuk semua
- f. Ketentraman dan keamanan

Definisi Konsepsional

Pembangunan sebagai perubahan sosial yang besar meningkatkan kesejahteraan manusia dari suatu keadaan tertentu ke keadaan yang dipandang lebih bernilai, komunikasi pembangunan merupakan proses interaksi seluruh warga masyarakat (aparatur pemerintah, penyuluh, tokoh masyarakat, LSM, individu atau kelompok/organisasi sosial) untuk menumbuhkan kesadaran dan menggerakkan partisipasi melalui proses perubahan terencana demi tercapainya mutu-hidup secara berkesinambungan, dengan menggunakan teknologi atau menerapkan ide-ide yang sudah terpilih.

Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Peran Kepala Adat Sebagai Komunikator dalam pembangunan Di Desa Tang Paye Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan.
2. Pengaruh Kepala Adat sebagai Mediator dalam Pembangunan Di Desa Tang Paye Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan.
3. Hambatan-hambatan yang di alami Kepala Adat dalam menjalankan kerja Kepala Adat Di Desa Tang Paye Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan

Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informasi sebagai sumber memperoleh data. Pemilihan informan berdasarkan atas subjek yang banyak memiliki informasi yang berkualitas dengan permasalahan yang akan diteliti dan bersedia memberikan data.

Informan menurut maleong (2006:132) adalah orang-orang yang dimanfaatkan untuk memperoleh informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang peneliti. Ia berkewajiban sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun bersifat informal. Pemanfaatan informasi bagi peneliti adalah agar dalam waktu yang relative singkat banyak informasi yang terjangkau karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran atau membandingkan suatu kejadian yang di temukan dan subjek lainnya. Untuk memilih sample (dalam hal ini informan kunci) dilakukan melalui persasive sampling (bertujuan). Selanjutnya untuk menentukan informan dilakukan dengan metode snowball sampling.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Kepala Adat Sebagai Komunikator

Kepala Adat sangat dekat dengan masyarakat dan sangat dihormati sehingga pesan-pesan yang disampaikan mengenai program pembangunan dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat. Peran kepala adat sebagai fasilitator komunikasi tetap dijalankan karena kepala adat mampu melakukan pendekatan dalam memberikan informasi mengenai program pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Adat, aparatur desa dan masyarakat desa Tang Paye lainnya, adapun upaya yang dilakukan kepala adat sebagai pemuka pendapat dalam menjalankan peran sebagai fasilitator komunikasi yaitu, kepala adat sebagai pemuka pendapat mendapatkan informasi atau pesan program pembangunan desa dari pemerintah desa kemudian kepala adat meneruskan dan menyampaikan informasi kepada warga.

Aktivitas pembangunan kepala adat menggunakan komunikasi tatap muka (*face to face*) merupakan salah satu cara komunikasi yang cukup efektif menurut Kepala Adat karena komunikator bisa langsung berkomunikasi dengan sasaran. Karena dari komunikasi ini kita mengharapkan perubahan tingkah laku dari komunikan. Peran kepala adat sebagai komunikator yang dilakukan oleh kepala adat telah dilakukan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari faktor daya tarik komunikator dan ikatan emosional yang kuat menjadi sumber kepercayaan komunikan dalam mensosialisasikan program pembangunan. Kepala Adat melakukan tugasnya yaitu dengan mengajak, mengenalkan, dan memberikan penjelasan tentang pembangunan kepada masyarakat. Apabila masyarakat siap menerima pembangunan tersebut, maka masyarakat harus mendukung dan terlibat dalam pembangunan tersebut.

Peran Kepala Adat Sebagai Mediator dalam Pembangunan Perencanaan Perbaikan jalan desa

Tugas Kepala Adat adalah membina dan memelihara kerukunan warga, ini berdasarkan Hukum Adat tahun 2004. Dalam hal ini Kepala Adat wajib membina dan memelihara kerukunan warganya agar tercipta kesinambungan hidup antar warga dan tidak ada perselisihan yang membuat kehidupan tidak aman dan tentram. Kepala Adat harus cepat tanggap untuk menangani masalah yang dialami warganya agar masalah tersebut tidak meluas dan mengganggu masyarakat sekitarnya.

Selain itu Kepala Adat wajib membarikan Pembinaan terhadap warganya tentang kerukunan, keamanan, dan ketertiban seperti yang tertulis dalam Hukum Adat Pasal 17 yang berbunyi : “Lembaga Adat berwenang / berhak mengadili setiap perkara yang diajukan kepada lembaga adat dan memutuskan sesuai hukum adat”. Disini dapat diketahui bahwa Adat mem punyai wewenang/ berhak atas setiap perkara yang diajukan kepada Adat.

Dengan demikian Peran Kepala Adat sangat membantu pemerintah desa Tang Paye dengan pembinaan dan memelihara kerukunan warganya sehingga program-program pemerintah desa dapat berjalan dengan lancar terutama program-program yang mengenai masyarakat guna menuju pembangunan yang diharapkan khususnya di desa Tang Paye.

Seperti hal yang terjadi dalam desa Tang Paye pada saat pembangunan dilaksanakan ada beberapa warga yang kurang mendukung pembangunan tersebut karena pembangunan tersebut dianggap merugikan mereka, pembangunan pelebaran jalan yang melalui tanah warga yang terdapat tanaman sebagai sumber

penghasilan bagi mereka sangat tidak disetujui oleh beberapa warga desa. Dalam menyelesaikan masalah ini kepala desa Tang Paye mengajak masyarakat yang bersangkutan untuk bermusyawarah untuk mencari jalan keluar yang baik dari masalah tersebut. Dalam musyawarah yang dilakukan belum bisa ditemukan keputusan yang baik karena warga yang tanahnya sebagai sarana pembangunan tetap bersikeras untuk tidak merelakan tanahnya sebagai sarana pembangunan dengan alasan adanya tanaman yang menjadi sumber penghasilan bagi mereka.

Melihat hal ini kepala Adat Turun tangan dengan harapan warga yang tidak terima tanahnya sebagai sarana pembangunan jalan dapat mengiklaskan tanahnya tersebut. Kepala Adat sebagai orang yang dihormati dan disegani dalam masyarakat adat menyampaikan kepada warga bahwa pentingnya suatu pembangunan seperti pembangunan jalan yang sudah diprogramkan, disampaikan oleh kepala adat pembangunan jalan dilakukan demi kepentingan umum agar wilayah tersebut lebih baik dari sebelumnya setelah menyampaikan bagaimana pentingnya pembangunan yang sudah diprogramkan Kepala Adat berharap warga yang kurang sepekat dengan adanya pembangunan pelebaran jalan tersebut mau menerima pembangunan tersebut.

Dalam merencanakan suatu pembangunan tentu terlebih dahulu menyusun rencana karena tanpa ada suatu perencanaan maka pembangunan itu tidak dapat dilakukan dengan begitu saja. Untuk mencapai suatu rencana yang menyangkut kepentingan umum khususnya pembangunan yang menyangkut langsung pada masyarakat yang menyangkut juga dengan kepentingan umum maka harus diadakan musyawarah terlebih dahulu oleh pihak-pihak terkait dalam perencanaan tersebut tentunya juga diharapkan juga dukungan dan partisipasi dari semua pihak masyarakat yang peduli terhadap pembangunan, seperti halnya Kepala Adat desa Tang Paye Kecamatan Krayan, sebagai tokoh yang disegani dan dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat di desa Tang Paye.

Dalam penelitian ini peran kepala adat adalah mendorong masyarakat untuk berpartisipasi pada perencanaan perbaikan jalan dalam hal ini kepala adat merupakan fasilitator pemerintah untuk melancarkan proses pembangunan yang akan diselenggarakan atau dilaksanakan. Dalam hal ini Kepala Adat memberikan pengarahan serta pengertian bagi masyarakat Desa Tang Paye yang lahannya atau batas wilayah tanahnya yang menjadi sasaran pembangunan agar dapat merelakannya demi kelancaran pelaksanaan pembangunan jalan yang telah direncanakan.

Hasil observasi di lapangan diketahui bahwa peran kepala adat pada perencanaan pembangunan sangat berpengaruh pada perencanaan pembangunan pelebaran jalan. Karena dalam hal ini kepala adat yang memberikan informasi tentang perencanaan pembangunan pelebaran jalan kepada masyarakat.

Peran Kepala Adat dalam perencanaan pembangunan pelebaran jalan adalah pemberi informasi kepada masyarakat. Kepala Adat bentuk memberikan arahan kepada masyarakat perencanaan pembangunan pelebaran jalan.

Pelaksanaan pembanguna di daerah pedesaan yang menjadi pendukung ialah dengan adanya pemerintah kabupaten dalam bidang sarana dan prasarana, mengisyaratkan program pioritas dalam pembanguna dari pemerintah yang menjadi pendukung ialah dengan adanya program teknologi sekarang dan tercipta berbagai sarana (radio, hand phone dan televisise) antara pemerintah dengan masyarakat dalam proses pelaksanaan pebangunan.

Perencanaan Pembangunan Saluran Air Minum

Tahap awal pembangunan adalah perencanaan yaitu serangkaian kegiatan maulai dari mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sampai dengan penetapan pemangunan. Masyarakat akan lebih percaya program pembangunan jika mereka di libatkan dalam proses perencanaan nya, karena dengan demikian mereka dapat mengetahui seluk-beluk program pembangunan tersebut.

Peran Kepala Adat dan tokoh kampung dalam mendorong partisipasi mayarakat pada program pembangunan saluran air minum, dimana dalam hal ini mengajak semua masyarakat desa tang paye untuk turut serta terlibat dalam gotong royong dalam pembangunan saluran air minum tanpa kecuali.

Berkaitan dengan peran kepala adat dalam perencanaan pembangunan saluran air minum, Dalam hal ini Kepala Adat Desa Tang Paye sangat memperhatikan masyarakat nya dan selalu memberikan kesempatan pada masyarakatnya untuk menyumbangkan ide-ide dalam hal ini apapun yang berkaitan dengan perencanaan pemangunan, kepala adat selalu selalu memerikan arahan pada masyarakat agar tidak kaku untuk memerikan masukan-masukan yang bersifat membangun desa tang paye.

Hasil oservasi di lapangan masyarakat Desa Tang paye mengakui bahwa ide-ide dari Kepala Adat yang meminta agar pembangunan saluran air minum mendapat dukungan dari tokoh kampung dan tokoh masyarakat serta dukungan dari semua masyarakat Desa Tang Paye, tujuan dari pembangunan saluran air minum ini adalah agar sumur bersih yang ada di ujung desa bias digunakan oleh masyarakat danantisipasi pada musim kemarau. Kepala Adat selalu menghimbau/mengajak masyarakat untuk bekerja sama dan tetap menjaga nilai-nilai adat istiadat serta mempererat tali persaudaraan dan kerja sama antar masyarakat.

Peran Kepala Adat dalam pelaksanaan pembangunan saluran air minum ini sangat di banggakan oleh masyarakat, karena dalam pelaksanaan nya Kepala Adat mengajak semua masyarakat desa tang paye untuk saling bekerja sama dan ergotong royong. Dalam bergotong royong masyarakat merasa rasa kebersamaan antara masyarakat semakin erat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dari fokus penelitian yaitu Peran Kepala Adat dalam Pembangunan di desa Tang Paye Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan dapat disimpulkan dari beberapa indikator sebagai berikut :

1. Peran Kepala Adat sebagai Komunikator

Peran kepala adat sebagai fasilitator komunikasi sangat berpengaruh karena Kepala Adat sangat dekat dengan masyarakat dan sangat dihormati sehingga pesan-pesan yang disampaikan mengenai program pembangunan dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat, Kepala Adat juga mampu melakukan pendekatan dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

2. Kepala Adat Sebagai Mediator dalam Pembangunan

Tugas Kepala Adat adalah membina dan memelihara kerukunan warga, dalam hal ini Kepala Adat wajib membina dan memelihara kerukunan warganya agar tercipta kesinambungan hidup antar warga dan tidak ada perselisihan yang membuat kehidupan tidak aman dan tentram.

Selain itu Kepala Adat wajib membarikan Pembinaan terhadap warganya tentang kerukunan, dalam Hukum Adat Lembaga Adat berwenang / berhak mengadili setiap perkara yang diajukan kepada lembaga adat dan memutuskan sesuai hukum adat”.

Saran

Dalam menjalankan peran dan fungsinya yang di embannya sebagai Kepala Adat, perlu kiranya pemerintah daerah memperhatikan tunjangan atau gaji yang diberikan kepada Kepala Adat, karena selama ini tunjangan atau gaji yang didapatkan sangat sedikit dan tidak sebanding dengan harga-harga barang yang mahal.

Perlu adanya alokasi gedung dalam menunjang peran dan tugas sebagai pemimpin dalam hal ini perlu adanya suatu realisasi gedung tersebut yang digunakan sebagai kantor adat yang dapat digunakan Kepala Adat pada saat bekerja.

Ketersediaan Sarana dan prasarana yang masih kurang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah daerah maupun pemerintah yang berada di kabupaten Nunukan. Dengan adanya harapan bantuan tersebut akan lebih meningkatkan pencapaian kualitas peran dan fungsi Kepala Adat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Asy'arie Abdul Haris, 2005, *Tinjauan Terhadap Hukum Adat Masyarakat Dayak Benuaq Kalimantan Timur*, Biro Humas Setdaprop Kalimantan Timur

Amri jahi, 1993. *Komunikasi Massa dan Pembangunan Pedesaan di Negara-Negara Dunia*

Ketiga: Suatu Pengantar. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Amirullah, dan Haris, Budiyo. 2004 *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Cangara, Hafied, 2002, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo2006, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Perss.

Conyeus Diana, 1984, *Perencanaan Sosial Dunia ke tiga*, PT. Gramedia: Jakarta.

- Effendy, Onong Uchjana. 2000. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
-2003. *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
-2006. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fahmi, Irham. 2014. *Perilaku Organisasi, Teori, Aplikasi dan Kasus*. Alfabeta : Bandung.
- Mathew B Miles & AMichael Humberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Buku Sumber Tentang MetodeMetode Baru, Penerbit Universitas Indonesia, Press, Jakarta.
- Moleong, Lexsi J, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rusada Karya: Bandung.
- Mardikanto, Totok. 1987. *Komunikasi Pembangunan*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosadakarya.
- Nasution, Zulkarimein. 1996. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
-2002. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Nurudin, 2008, *Sitem Komunikasi Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
-2004, *Sistem Komunikasi Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Patton, Adri, 2005. *Peran Pemimpin Infromal dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di daerah perbatasan Kabupaten Malinau*.
-2006. *Perilaku dan Pengembangan Organisasi*. Agritek YPN dan SOFA Press: Malang
- Rivai, Veithzal, 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perubahan : dari Teori Ke Praktik*, Edisi Pertama, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ranganath, 1976, *Telling the People Tell Themselves*, Media Asia 3
- Trijono Lambang, 2007. *Pembangunan Sebagai Perdamaian*.Yayasan Obor, Jakarta
- Siagian, Sondang P. 2010. *Teori & Praktek Kepemimpinan*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Wasistiona, Sadu, 2002. *Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Alqa, Jakarta
- Widjaja. Haw, 2001, *Pemerintahan Desa/Marga*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Widodo, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Absolut: Jakarta

Yuwono Teguh, 2001, *Manajemen Otonomi Daerah Berdasarkan Pradigma Baru*, Clogapps Diponegoro University: Semarang.

Dokumen-dokumen :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang pemerintahan daerah.

Tahun 2004 Pedomann Umum Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Lembaga Adat Kabupaten Nunukan.